



STRATEGI PERPUSTAKAAN INKLUSIF DALAM MEMENUHI HAK BELAJAR SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

Diajeng Pramutia Abna¹, M Ary Irawan², Baiq Rohiyatun³

Administrasi Pendidikan, FIPP, Universitas Pendidikan Mandalika^{1,2,3}

e-mail: diajengpramutiaabna@gmail.com, m.ary_irawan@undikma.ac.id

Diterima: 27/06/2026; Direvisi: 12/07/2026; Diterbitkan: 17/09/2026

ABSTRAK

Layanan perpustakaan inklusif di SMKN 5 Mataram belum optimal dalam mendukung pemenuhan hak belajar siswa berkebutuhan khusus. Meskipun sekolah telah memberikan akses yang sama kepada seluruh siswa, layanan perpustakaan belum sepenuhnya didukung kebijakan khusus, SOP, koleksi adaptif, teknologi bantu, serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pelayanan inklusif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, hambatan, dan upaya pengembangan strategi perpustakaan inklusif sekaligus merumuskan model strategi yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman serta diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses layanan telah terbuka, tetapi pelaksanaannya masih bersifat umum dan belum adaptif terhadap kebutuhan siswa. Hambatan meliputi keterbatasan fasilitas, koleksi, teknologi bantu, anggaran, kompetensi SDM, dan SOP. Penelitian merumuskan Model Strategi ALKE (Aksesibilitas, Layanan Adaptif, Kolaborasi, dan Evaluasi) sebagai kerangka pengembangan perpustakaan inklusif secara sistematis dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Perpustakaan Inklusif, Hak Belajar, Siswa Berkebutuhan Khusus, Layanan Perpustakaan.*

ABSTRACT

Inclusive library services at SMKN 5 Mataram have not yet been optimal in supporting the fulfillment of learning rights for students with special needs. Although the school provides equal access to all students, library services are not fully supported by specific policies, standard operating procedures, adaptive collections, assistive technology, or human resources with competencies in inclusive services. This study aims to describe the planning, implementation, barriers, and development efforts of an inclusive library strategy while formulating a strategy model for sustainable development. This study employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman model and validated through source and technique triangulation. The results show that library access is available, but services remain general and insufficiently adaptive to students' needs. The barriers include limited facilities, collections, assistive technology, budget, human resource competencies, and standard operating procedures. The study formulates the ALKE Strategy Model (Accessibility, Adaptive Services, Collaboration, and Evaluation) as a framework for systematic and sustainable development of inclusive school libraries.

Keywords: *Inclusive Library, Learning Rights, Students With Special Needs, Library Services.*

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun emosional. Pemenuhan hak belajar dalam pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan kesempatan mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi juga mencakup tersedianya lingkungan dan sumber belajar yang dapat diakses sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap peserta didik. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan inklusif membutuhkan dukungan dari berbagai komponen sekolah agar peserta didik berkebutuhan khusus tidak hanya diterima dalam lingkungan pendidikan, tetapi juga memiliki kesempatan yang nyata untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan sumber belajar secara setara. Prinsip tersebut sejalan dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional mengenai pendidikan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, seluruh komponen sekolah, termasuk perpustakaan, perlu menyediakan layanan yang aksesibel, adaptif, dan responsif terhadap keberagaman kebutuhan peserta didik. Dukungan yang sesuai dengan karakteristik pengguna menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang setara dan partisipatif (Dignath et al., 2022; Raharja et al., 2021). Pada tingkat perpustakaan, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui penyesuaian fasilitas, sumber informasi, serta bentuk pendampingan sehingga peserta didik dengan disabilitas mampu mengakses dan memanfaatkan layanan perpustakaan secara optimal (Roberson et al., 2022).

Sebagai salah satu pusat sumber belajar di sekolah, perpustakaan memiliki posisi strategis dalam mendukung pemenuhan hak belajar peserta didik. Perpustakaan menyediakan akses terhadap informasi, bahan bacaan, dan berbagai sumber pengetahuan yang menunjang proses pembelajaran. Dalam lingkungan sekolah inklusif, fungsi tersebut perlu diperluas sehingga perpustakaan tidak hanya menyediakan koleksi bagi siswa secara umum, tetapi juga memastikan bahwa siswa berkebutuhan khusus dapat mengakses dan memanfaatkan sumber informasi sesuai dengan kebutuhannya. Upaya tersebut memerlukan penyesuaian pada berbagai aspek layanan, antara lain penyediaan koleksi yang ramah disabilitas, teknologi bantu, fasilitas yang mudah diakses, serta kompetensi pustakawan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan karakteristik pengguna. Apabila aspek-aspek tersebut dapat dipenuhi, perpustakaan berpotensi menjadi ruang belajar yang nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang lebih setara bagi seluruh peserta didik. Sebaliknya, keterbatasan fasilitas, sumber informasi, maupun kompetensi pengelola dapat menjadi hambatan bagi siswa berkebutuhan khusus dalam memperoleh sumber belajar yang mereka perlukan. Oleh karena itu, pengembangan layanan perpustakaan yang inklusif merupakan bagian penting dari upaya sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang dapat diakses oleh seluruh peserta didik (Darmanto, 2022).

Kebutuhan terhadap layanan perpustakaan yang inklusif tersebut menjadi semakin penting dalam konteks SMKN 5 Mataram, salah satu sekolah menengah kejuruan penyelenggara pendidikan inklusif di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data sekolah, terdapat 30 siswa berkebutuhan khusus yang tersebar pada kelas X, XI, dan XII dengan karakteristik yang beragam, meliputi tunarungu, tunagrahita, dan *slow learner*. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan belajar siswa tidak dapat dipenuhi melalui pendekatan layanan yang seragam, termasuk dalam pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa perpustakaan telah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa untuk memanfaatkan layanan yang tersedia. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah keterbatasan, seperti fasilitas aksesibilitas yang



belum memadai, minimnya koleksi yang ramah disabilitas, belum tersedianya teknologi bantu pembelajaran, serta terbatasnya kompetensi pustakawan dalam memberikan layanan kepada siswa berkebutuhan khusus. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip layanan yang setara dengan dukungan yang tersedia di lapangan. Situasi ini penting dikaji untuk memahami bagaimana perpustakaan merencanakan dan melaksanakan layanan inklusif, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengembangkan layanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.

Permasalahan mengenai akses dan pengembangan layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas telah menjadi perhatian dalam sejumlah penelitian. Pawestri dan Inawati (2024), misalnya, mengkaji penerapan layanan prima pada pojok Braille di Perpustakaan Umum Kota Malang dan memberikan gambaran mengenai penyediaan layanan yang mendukung akses informasi bagi pengguna dengan hambatan penglihatan. Rahmady dkk. (2025) menyoroti berbagai kendala layanan disabilitas di Perpustakaan Nasional, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, pendanaan, dan kompetensi pustakawan. Sementara itu, Purnomo dan Wikandani (2024) menekankan pemanfaatan teknologi adaptif bagi penyandang tunanetra, sedangkan Ridlo dkk. (2024) membahas praktik dan tantangan perpustakaan inklusif melalui kajian literatur. Pada ranah pendidikan, Izzah (2022) serta Susanti dan Ramadhani (2024) lebih berfokus pada implementasi pendidikan inklusif dan pelayanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa aksesibilitas, kompetensi pengelola, teknologi adaptif, dan dukungan layanan merupakan unsur penting dalam mewujudkan layanan yang inklusif. Meskipun demikian, fokus penelitian terdahulu masih cenderung diarahkan pada jenis layanan tertentu, perpustakaan umum, aspek teknologi adaptif, atau implementasi pendidikan inklusif secara umum.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah penelitian terkait strategi pengelolaan perpustakaan sekolah yang secara khusus diarahkan untuk memenuhi hak belajar siswa berkebutuhan khusus pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas aksesibilitas atau layanan tertentu, pemanfaatan teknologi adaptif, layanan disabilitas pada perpustakaan umum, serta implementasi pendidikan inklusif di lingkungan sekolah. Sementara itu, kajian yang mengintegrasikan aksesibilitas, layanan adaptif, kolaborasi, dan evaluasi sebagai satu kesatuan strategi pengelolaan perpustakaan sekolah inklusif masih terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan Model Strategi Perpustakaan Inklusif ALKE (Aksesibilitas, Layanan Adaptif, Kolaborasi, dan Evaluasi) yang dibangun berdasarkan temuan empiris mengenai perencanaan, pelaksanaan, hambatan, dan upaya pengembangan layanan perpustakaan bagi siswa berkebutuhan khusus. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kondisi dan permasalahan layanan, tetapi juga mengintegrasikan berbagai komponen pengelolaan perpustakaan ke dalam suatu kerangka strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan layanan secara lebih responsif terhadap keragaman kebutuhan siswa.

Berdasarkan celah dan kebaruan tersebut, penelitian ini berfokus pada strategi perpustakaan inklusif di SMKN 5 Mataram dengan mengkaji perencanaan, pelaksanaan layanan, hambatan, dan upaya pengembangan layanan bagi siswa berkebutuhan khusus. Hasil kajian tersebut menjadi dasar dalam merumuskan Model Strategi Perpustakaan Inklusif ALKE, yang menempatkan aksesibilitas, layanan adaptif, kolaborasi, dan evaluasi sebagai komponen yang saling berkaitan dalam mendukung pemenuhan hak belajar siswa. Model ini diarahkan tidak hanya untuk menggambarkan praktik layanan pada konteks SMKN 5 Mataram, tetapi juga memberikan kerangka strategis yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan

perpustakaan sekolah inklusif secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, hambatan, dan upaya pengembangan perpustakaan inklusif di SMKN 5 Mataram serta merumuskan Model Strategi Perpustakaan Inklusif ALKE sebagai kerangka pengembangan layanan perpustakaan yang aksesibel, adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang dilaksanakan di SMKN 5 Mataram untuk mengkaji strategi perpustakaan inklusif dalam memenuhi hak belajar siswa berkebutuhan khusus. Informan penelitian dipilih secara purposif, meliputi kepala sekolah (KS), kepala perpustakaan (KP), guru pendamping khusus (GPK), dan siswa berkebutuhan khusus (SBK) yang terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan layanan perpustakaan inklusif. Instrumen utama penelitian adalah peneliti yang didukung oleh pedoman wawancara, lembar observasi, dan pedoman dokumentasi. Data dikumpulkan melalui observasi terhadap kondisi fisik perpustakaan, aksesibilitas layanan, serta aktivitas siswa berkebutuhan khusus, dilanjutkan dengan wawancara mendalam kepada setiap informan untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, hambatan, dan upaya pengembangan layanan perpustakaan inklusif, serta dokumentasi berupa profil sekolah, struktur organisasi perpustakaan, foto fasilitas, dan dokumen pendukung lainnya.

Data yang diperoleh dianalisis secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga seluruh informasi dinilai memadai untuk menjawab fokus penelitian. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari kepala sekolah, kepala perpustakaan, guru pendamping khusus, dan siswa berkebutuhan khusus, serta triangulasi teknik dengan mencocokkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Karakteristik informan penelitian disajikan pada Tabel 1 untuk memberikan gambaran mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

Kode	Keterangan
KS	Kepala sekolah
KP	Kepala perpustakaan
GPK	Guru pendamping khusus
SBK	Siswa berkebutuhan khusus

Berdasarkan Tabel 1, informan penelitian terdiri atas empat kelompok yang memiliki peran berbeda dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan layanan perpustakaan inklusif. Kepala sekolah memberikan informasi mengenai kebijakan dan dukungan kelembagaan, sedangkan kepala perpustakaan memberikan informasi mengenai pengelolaan dan pelaksanaan layanan perpustakaan. Guru pendamping khusus memberikan perspektif mengenai kebutuhan dan pendampingan siswa berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan pemanfaatan sumber belajar. Sementara itu, siswa berkebutuhan khusus memberikan informasi mengenai pengalaman dan pemanfaatan layanan perpustakaan dari perspektif pengguna, sehingga



keseluruhan informan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai strategi perpustakaan inklusif yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Perpustakaan SMKN 5 Mataram, diperoleh temuan bahwa sekolah telah menerapkan pendidikan inklusif dengan menerima siswa berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran. Keberadaan perpustakaan sekolah menjadi salah satu fasilitas pendukung yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pemenuhan hak belajar siswa berkebutuhan khusus. Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa berkebutuhan khusus telah memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas dan layanan perpustakaan sebagaimana siswa lainnya. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala, baik dalam aspek perencanaan maupun pelaksanaan layanan, yang menyebabkan penyelenggaraan perpustakaan inklusif belum berjalan secara optimal.

Perencanaan Strategi Perpustakaan Inklusif

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, perencanaan strategi perpustakaan inklusif di SMKN 5 Mataram telah didukung oleh adanya komitmen sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik, termasuk siswa berkebutuhan khusus, untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Perencanaan layanan juga melibatkan koordinasi antara kepala sekolah, kepala perpustakaan, dan guru pendamping khusus dalam menyesuaikan layanan dengan kebutuhan siswa. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam perencanaan khusus yang terdokumentasi dan menjadi dasar penyelenggaraan layanan perpustakaan inklusif. Kepala sekolah mengungkapkan bahwa:

“SMKN 5 Mataram telah berupaya menerapkan prinsip pendidikan inklusif melalui pemberian akses yang sama kepada seluruh peserta didik dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Perencanaan layanan dilakukan melalui koordinasi antara kepala sekolah, kepala perpustakaan, dan guru pendamping khusus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara kebijakan sekolah telah memiliki komitmen terhadap pendidikan inklusif. Namun, berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa perpustakaan belum memiliki program kerja khusus yang secara spesifik ditujukan bagi siswa berkebutuhan khusus.” (KS.2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan telah terdapat perhatian terhadap penyediaan akses perpustakaan bagi seluruh siswa, tetapi belum disertai perencanaan operasional yang secara khusus mengatur layanan bagi siswa berkebutuhan khusus. Hasil dokumentasi juga menunjukkan belum adanya dokumen tertulis berupa SOP, pedoman layanan, maupun analisis kebutuhan siswa berkebutuhan khusus sebagai dasar pengembangan layanan perpustakaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen sekolah terhadap pendidikan inklusif dan ketersediaan perangkat perencanaan yang dapat mengarahkan pelaksanaan layanan secara sistematis. Dengan demikian, perencanaan strategi perpustakaan inklusif masih memerlukan penguatan dalam bentuk kebijakan, standar operasional, dan analisis kebutuhan yang terdokumentasi. Temuan mengenai aspek kebijakan,

SOP, analisis kebutuhan, dan komitmen sekolah tersebut dirangkum dalam Tabel 2 untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perencanaan strategi perpustakaan inklusif di SMKN 5 Mataram.

Tabel 2. Temuan Perencanaan Strategi Perpustakaan Inklusif

Indikator	Temuan
Kebijakan	Belum ada kebijakan khusus perpustakaan inklusif
SOP	Belum tersedia SOP layanan ABK
Analisis kebutuhan	Belum dilakukan secara sistematis
Komitmen sekolah	Sudah ada, namun belum terdokumentasi dalam kebijakan khusus

Berdasarkan Tabel 2, aspek perencanaan strategi perpustakaan inklusif di SMKN 5 Mataram menunjukkan bahwa komitmen sekolah terhadap pendidikan inklusif telah tersedia, tetapi belum didukung oleh perangkat perencanaan yang spesifik. Tabel tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat kebijakan khusus yang mengatur penyelenggaraan perpustakaan inklusif dan belum tersedia SOP layanan bagi siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, analisis kebutuhan siswa berkebutuhan khusus belum dilakukan secara sistematis sehingga perencanaan layanan belum sepenuhnya didasarkan pada karakteristik dan kebutuhan pengguna. Temuan pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa penguatan aspek perencanaan menjadi kebutuhan penting agar komitmen sekolah dapat diterjemahkan ke dalam layanan perpustakaan inklusif yang lebih terarah dan terstandar.

Pelaksanaan Layanan Perpustakaan Inklusif

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pelaksanaan layanan perpustakaan inklusif di SMKN 5 Mataram telah memberikan akses kepada siswa berkebutuhan khusus untuk menggunakan fasilitas perpustakaan. Siswa berkebutuhan khusus dapat berkunjung, membaca, serta memanfaatkan perpustakaan untuk mengerjakan tugas sekolah sebagaimana siswa lainnya. Guru pendamping khusus juga memberikan bantuan ketika siswa mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang diperoleh dari sumber belajar. Meskipun demikian, pelaksanaan layanan masih menghadapi keterbatasan dalam hal kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan koleksi khusus, serta pemanfaatan teknologi bantu yang sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Kepala perpustakaan mengungkapkan bahwa:

“Guru pendamping khusus mengakui bahwa mereka belum pernah memperoleh pelatihan khusus mengenai pelayanan perpustakaan inklusif. Akibatnya, pelayanan kepada siswa berkebutuhan khusus masih dilakukan berdasarkan pengalaman dan pendekatan umum. Dalam hal koleksi perpustakaan, sebagian besar bahan pustaka masih berupa buku cetak umum. Koleksi yang secara khusus diperuntukkan bagi siswa berkebutuhan khusus masih sangat terbatas. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam mendukung kebutuhan belajar siswa berkebutuhan khusus secara maksimal. Selain koleksi, pemanfaatan teknologi bantu dalam layanan perpustakaan juga masih minim. Perpustakaan belum memiliki media digital aksesibel, aplikasi pembaca layar, maupun fasilitas audio learning yang dapat membantu siswa berkebutuhan khusus dalam memperoleh informasi.” (KP.2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan perpustakaan masih lebih banyak menggunakan pendekatan layanan umum dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Keterbatasan pelatihan bagi guru pendamping khusus maupun tenaga yang terlibat dalam pelayanan menyebabkan pendampingan masih mengandalkan pengalaman dan pendekatan yang tersedia. Pada aspek koleksi, sebagian besar bahan pustaka masih berupa buku cetak umum, sedangkan koleksi yang secara khusus mendukung kebutuhan siswa berkebutuhan khusus masih terbatas. Kondisi serupa juga ditemukan pada pemanfaatan teknologi bantu karena perpustakaan belum memiliki media digital aksesibel, aplikasi pembaca layar, maupun fasilitas *audio learning* yang dapat memperluas akses siswa terhadap informasi. Dari perspektif pengguna, siswa berkebutuhan khusus mengungkapkan bahwa *“Saya pernah berkunjung ke perpustakaan, akan tetapi koleksi sesuai kebutuhan kurang spesifik, terkait kondisi ruangan sangat ramah, tenang, nyaman.”* (SBK.2026)

Pernyataan siswa tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan telah memberikan pengalaman ruang belajar yang cukup positif dari sisi kenyamanan dan suasana. Siswa dapat memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat membaca dan memperoleh sumber belajar, tetapi masih menemukan keterbatasan pada ketersediaan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa siswa berkebutuhan khusus cukup aktif memanfaatkan perpustakaan, terutama untuk membaca dan mengerjakan tugas sekolah. Guru pendamping khusus turut memberikan bantuan ketika siswa mengalami kesulitan dalam memahami informasi, sehingga pendampingan menjadi salah satu bentuk dukungan yang telah berjalan dalam pelaksanaan layanan.

Secara keseluruhan, temuan tersebut menunjukkan bahwa akses dasar terhadap perpustakaan telah tersedia dan siswa berkebutuhan khusus telah memanfaatkan layanan yang ada. Namun, kesamaan akses belum sepenuhnya diikuti oleh kesesuaian layanan dengan karakteristik kebutuhan masing-masing siswa. Keterbatasan koleksi khusus, teknologi bantu, dan kompetensi pelayanan menunjukkan bahwa perpustakaan masih perlu mengembangkan bentuk layanan yang lebih adaptif dan aksesibel. Kondisi pelaksanaan layanan perpustakaan inklusif tersebut dirangkum dalam Tabel 3 untuk memperlihatkan kondisi masing-masing aspek yang ditemukan di lapangan.

Tabel 3. Pelaksanaan Layanan Perpustakaan Inklusif

Aspek	Kondisi
Akses masuk perpustakaan	Terbuka untuk seluruh siswa
Layanan peminjaman	Sama untuk seluruh siswa
Pendampingan belajar	Dilakukan oleh guru pendamping
Media digital aksesibel	Masih terbatas
Media pembelajaran visual	Belum tersedia

Berdasarkan Tabel 3, pelaksanaan layanan perpustakaan inklusif telah memberikan akses dasar yang relatif terbuka bagi seluruh siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Akses masuk dan layanan peminjaman diberikan secara sama kepada seluruh siswa, sedangkan pendampingan belajar dilakukan oleh guru pendamping khusus ketika siswa membutuhkan bantuan. Namun, Tabel 3 juga menunjukkan masih adanya keterbatasan pada media digital

aksesibel dan belum tersedianya media pembelajaran visual yang dapat mendukung kebutuhan belajar siswa secara lebih beragam. Dengan demikian, pelaksanaan layanan telah memenuhi aspek keterbukaan akses, tetapi masih memerlukan pengembangan pada aspek adaptasi layanan, media, dan sumber belajar agar kesetaraan akses dapat diikuti dengan kesetaraan dalam memperoleh manfaat layanan.

Hambatan Pelaksanaan Perpustakaan Inklusif

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perpustakaan inklusif di SMKN 5 Mataram masih menghadapi hambatan pada aspek sarana dan prasarana, koleksi, sumber daya manusia, anggaran, serta perangkat standar layanan. Keterbatasan tersebut saling berkaitan dan memengaruhi kemampuan perpustakaan dalam menyediakan akses serta sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Guru pendamping khusus mengungkapkan bahwa *“Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama meliputi keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung layanan inklusif. Perpustakaan belum memiliki koleksi khusus dalam format braille, audiobook, maupun perangkat teknologi bantu yang dapat mendukung kebutuhan belajar siswa berkebutuhan khusus secara optimal.”* (GPK.2026) Hasil observasi memperkuat temuan tersebut, yaitu belum tersedianya jalur kursi roda, koleksi Braille, *audio book*, komputer aksesibel, dan perangkat teknologi bantu lainnya, sementara keterbatasan anggaran turut memengaruhi pengembangan sarana, koleksi, dan teknologi pendukung secara bertahap.

Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dan belum optimalnya standardisasi layanan menjadi faktor yang saling memengaruhi dalam pelaksanaan perpustakaan inklusif. Keterbatasan sarana dan koleksi membatasi akses siswa terhadap fasilitas dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan spesifiknya, sedangkan sumber daya manusia yang belum memperoleh pelatihan khusus menyebabkan pelayanan masih dilakukan berdasarkan pengalaman dan pendekatan umum. Di sisi lain, belum tersedianya SOP khusus menyebabkan pelaksanaan layanan belum memiliki standar yang secara spesifik mengarahkan pelayanan bagi siswa berkebutuhan khusus. Bentuk hambatan dan dampaknya terhadap pelaksanaan perpustakaan inklusif di SMKN 5 Mataram selanjutnya dirangkum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Hambatan Implementasi Perpustakaan Inklusif

Hambatan	Dampak
Sarana terbatas	Layanan belum aksesibel
Koleksi terbatas	Informasi sulit diakses ABK
SDM belum terlatih	Pelayanan kurang optimal
Anggaran terbatas	Pengembangan berjalan lambat
SOP belum tersedia	Layanan belum terstandar

Berdasarkan Tabel 4, hambatan implementasi perpustakaan inklusif mencakup lima aspek utama, yaitu keterbatasan sarana, koleksi, sumber daya manusia, anggaran, dan SOP. Keterbatasan sarana berdampak pada belum aksesibelnya layanan, sedangkan keterbatasan koleksi menyebabkan informasi yang tersedia belum sepenuhnya mudah diakses oleh siswa berkebutuhan khusus. Pada aspek sumber daya manusia dan anggaran, belum adanya pelatihan khusus serta keterbatasan pembiayaan menyebabkan pengembangan layanan berjalan lambat

dan pelayanan belum optimal. Sementara itu, belum tersedianya SOP menyebabkan layanan belum memiliki standar khusus, sehingga Tabel 4 memperlihatkan bahwa hambatan perpustakaan inklusif mencakup aspek fasilitas sekaligus aspek pengelolaan dan kelembagaan.

Model Strategi Perpustakaan Inklusif Berbasis ALKE

Berdasarkan sintesis hasil penelitian mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan hambatan layanan perpustakaan inklusif di SMKN 5 Mataram, diperoleh rumusan model strategi perpustakaan inklusif berbasis ALKE (Aksesibilitas, Layanan Adaptif, Kolaborasi, dan Evaluasi). Model ini dirumuskan berdasarkan keterkaitan antara kondisi aktual layanan perpustakaan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus dalam memperoleh sumber dan layanan belajar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak belajar tidak cukup hanya dengan memberikan akses yang sama kepada seluruh siswa, tetapi memerlukan penyesuaian layanan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, model ALKE disusun sebagai kerangka strategi yang menghubungkan perencanaan, layanan adaptif, kolaborasi, serta evaluasi dan pengembangan secara berkelanjutan.

Model Strategi Perpustakaan Inklusif berbasis ALKE terdiri atas empat komponen utama yang saling berkaitan. Komponen pertama adalah perencanaan, yang menjadi dasar dalam menentukan kebijakan, program, kebutuhan fasilitas, koleksi, serta bentuk layanan yang sesuai dengan karakteristik siswa berkebutuhan khusus. Komponen kedua adalah layanan perpustakaan adaptif, yang diarahkan pada penyediaan akses, koleksi, media, fasilitas, dan pendampingan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Komponen ketiga adalah kolaborasi, yang melibatkan guru, guru pendamping khusus (GPK), pustakawan, dan orang tua dalam mendukung pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar. Komponen keempat adalah evaluasi dan pengembangan, yang dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan layanan dan menentukan perbaikan secara berkelanjutan agar pemenuhan hak belajar siswa berkebutuhan khusus dapat berlangsung secara optimal. Adapun susunan Model Strategi Perpustakaan Inklusif Berbasis ALKE dapat disajikan pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Model Strategi Perpustakaan Inklusif Berbasis ALKE



Gambar 1 menunjukkan bahwa strategi perpustakaan inklusif dimulai dari tahap perencanaan yang didasarkan pada kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Perencanaan tersebut menjadi landasan bagi penyediaan layanan perpustakaan yang adaptif, baik dalam



aspek aksesibilitas, koleksi, fasilitas, media pembelajaran, maupun pendampingan. Pelaksanaan layanan selanjutnya memerlukan kolaborasi antara guru, GPK, pustakawan, dan orang tua agar kebutuhan belajar siswa dapat dipahami dan ditangani secara lebih menyeluruh. Selanjutnya, evaluasi dan pengembangan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap sesuai dengan kebutuhan siswa dan mampu mendukung pemenuhan hak belajar secara optimal.

Model ALKE tersebut terbentuk sebagai hasil sintesis dari temuan penelitian mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan layanan, dan hambatan yang ditemukan di Perpustakaan SMKN 5 Mataram. Keterbatasan kebijakan khusus, SOP, analisis kebutuhan, koleksi, fasilitas aksesibel, teknologi bantu, kompetensi sumber daya manusia, dan anggaran menunjukkan perlunya strategi yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan akses, tetapi juga pada penyesuaian layanan dan pengembangan berkelanjutan. Dalam model ini, aksesibilitas menjadi dasar untuk memastikan bahwa siswa dapat menggunakan perpustakaan, sedangkan layanan adaptif memastikan bahwa akses tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Kolaborasi dan evaluasi kemudian menjadi mekanisme penguatan agar strategi perpustakaan inklusif dapat terus dikembangkan dan pada akhirnya mendukung terpenuhinya hak belajar siswa berkebutuhan khusus secara optimal.

Pembahasan

Perencanaan Strategi Perpustakaan Inklusif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan perpustakaan inklusif di SMKN 5 Mataram telah didukung oleh komitmen sekolah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada siswa berkebutuhan khusus dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Komitmen tersebut terlihat melalui koordinasi antara kepala sekolah, kepala perpustakaan, dan guru pendamping khusus. Namun, komitmen tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program kerja yang secara khusus mengatur layanan inklusif. Belum tersedianya SOP, pedoman layanan, dan analisis kebutuhan siswa secara sistematis menunjukkan bahwa perencanaan masih bersifat umum dan belum berbasis pada kebutuhan spesifik pengguna. Temuan ini sejalan dengan Ridlo et al. (2024) yang menyatakan bahwa perencanaan perpustakaan inklusif perlu memperhatikan aksesibilitas, koleksi, teknologi adaptif, sumber daya manusia, dan kebijakan layanan. Geri dan Mudawamah (2025) juga menegaskan bahwa keberhasilan layanan inklusif diawali dengan perencanaan fasilitas, penguatan kapasitas pustakawan, serta kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan demikian, persoalan utama pada tahap perencanaan bukan terletak pada ketiadaan komitmen sekolah, melainkan pada belum adanya sistem yang mampu menerjemahkan komitmen tersebut menjadi kebijakan, program, dan standar layanan yang operasional.

Kondisi tersebut sekaligus menegaskan pentingnya analisis kebutuhan sebagai dasar dalam merancang layanan perpustakaan inklusif. Perbedaan karakteristik dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus menunjukkan bahwa layanan yang seragam belum tentu menghasilkan akses belajar yang setara. Muthia dan Fauziah (2025) menjelaskan bahwa perpustakaan berbasis inklusi sosial perlu menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, program inklusif, koleksi yang sesuai, serta penguatan kompetensi pustakawan agar seluruh pemustaka dapat mengakses layanan secara optimal. Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut perlu diwujudkan melalui perencanaan yang secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan siswa, menentukan fasilitas dan koleksi yang diperlukan, serta menetapkan bentuk pendampingan dan layanan yang sesuai. Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia



sumber informasi, tetapi juga sebagai ruang belajar yang mendukung kesetaraan akses, partisipasi, dan keterlibatan seluruh pengguna.

Pelaksanaan Layanan Perpustakaan Inklusif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan perpustakaan di SMKN 5 Mataram telah memberikan akses terbuka bagi siswa berkebutuhan khusus. Siswa dapat mengunjungi perpustakaan, membaca, dan memanfaatkannya untuk mengerjakan tugas, dengan dukungan guru pendamping khusus ketika mengalami kesulitan memahami informasi. Kondisi ruang yang ramah, tenang, dan nyaman turut mendukung pemanfaatan perpustakaan. Namun, keterbukaan akses tersebut belum sepenuhnya diikuti layanan yang adaptif karena koleksi khusus, media pembelajaran visual, media digital aksesibel, dan teknologi bantu masih terbatas. Sebagian besar koleksi masih berupa buku cetak umum, sedangkan Braille, *audiobook*, aplikasi pembaca layar, dan fasilitas *audio learning* belum tersedia secara memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa kesetaraan layanan tidak cukup diwujudkan melalui pemberian akses yang sama, tetapi perlu disertai penyesuaian berdasarkan karakteristik dan kebutuhan belajar siswa. Jaya et al. (2025) menegaskan bahwa pendidikan inklusif masih menghadapi tantangan dalam menyediakan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan individual siswa berkebutuhan khusus. Dalam konteks perpustakaan, prinsip tersebut berarti layanan perlu dikembangkan dari sekadar memberikan kesempatan menggunakan fasilitas menuju penyediaan sumber, media, teknologi, dan pendampingan yang memungkinkan siswa mengakses informasi secara lebih optimal.

Keterbatasan koleksi dan teknologi bantu menunjukkan bahwa perpustakaan telah berfungsi sebagai ruang belajar, tetapi belum sepenuhnya berkembang sebagai sumber belajar yang adaptif bagi siswa dengan kebutuhan yang beragam. Padahal, Irawan dan Anwar (2025) menunjukkan bahwa teknologi seperti *speech-to-text* dan *text-to-speech* dapat meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan melalui pengalaman belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Selain dukungan fasilitas, kualitas layanan juga dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru pendamping khusus belum memperoleh pelatihan khusus mengenai pelayanan perpustakaan inklusif sehingga pendampingan masih dilakukan berdasarkan pengalaman dan pendekatan umum. Kondisi ini sejalan dengan Wood et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pengembangan profesional melalui pelatihan pendidikan inklusif berperan dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik inklusif pendidik. Oleh karena itu, penguatan kompetensi perlu diperluas tidak hanya kepada guru pendamping khusus, tetapi juga pustakawan dan tenaga sekolah yang berinteraksi langsung dengan siswa berkebutuhan khusus agar layanan dapat diberikan secara lebih adaptif, responsif, dan profesional.

Hambatan Pelaksanaan Perpustakaan Inklusif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan perpustakaan inklusif di SMKN 5 Mataram meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, koleksi, sumber daya manusia, anggaran, serta belum tersedianya SOP khusus. Hambatan tersebut saling berkaitan dan memengaruhi kualitas layanan secara keseluruhan. Keterbatasan anggaran, misalnya, dapat menghambat pengadaan fasilitas dan koleksi, sementara keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dapat memengaruhi optimalisasi fasilitas yang tersedia. Di sisi lain, belum adanya SOP menyebabkan pelaksanaan layanan belum memiliki standar yang dapat menjadi pedoman dalam memenuhi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Temuan ini sejalan dengan Khariri (2024) yang menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif masih terkendala

keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Permatasari et al. (2026) juga menemukan adanya kendala berupa ketimpangan tenaga pendidik berkualifikasi, keterbatasan infrastruktur, dan belum meratanya dukungan kebijakan, sedangkan Suwarta et al. (2025) mengidentifikasi keterbatasan sumber daya dan pelatihan guru sebagai hambatan penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa hambatan di SMKN 5 Mataram merupakan bagian dari persoalan implementasi inklusi yang lebih luas, tetapi secara khusus berdampak pada kemampuan perpustakaan dalam menyediakan sumber dan layanan belajar yang aksesibel.

Selain keterbatasan sumber daya, penelitian menemukan bahwa kolaborasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan layanan perpustakaan inklusif belum optimal. Perpustakaan tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan siswa berkebutuhan khusus secara mandiri karena kebutuhan tersebut berkaitan dengan kebijakan sekolah, pendampingan pembelajaran, dukungan keluarga, pengadaan fasilitas, dan peningkatan kompetensi pengelola. Rejeki et al. (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus bersifat multidimensional, mencakup komunikasi dengan sekolah, dukungan pembelajaran di rumah, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan pendidikan. Kolaborasi antara keluarga dan sekolah tersebut dapat memperkuat dukungan pendidikan secara lebih terkoordinasi dan berkesinambungan. Dalam konteks perpustakaan, kondisi ini menunjukkan perlunya kolaborasi yang lebih terstruktur antara kepala sekolah, guru, GPK, pustakawan, orang tua, dan pihak terkait lainnya agar kebutuhan belajar siswa dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara bersama.

Berbagai hambatan tersebut menegaskan bahwa pengembangan perpustakaan inklusif tidak cukup dilakukan melalui penambahan fasilitas secara parsial, tetapi memerlukan strategi yang menghubungkan perencanaan, layanan adaptif, kolaborasi, dan evaluasi secara berkelanjutan. Cabatay et al. (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pendidikan inklusif dipengaruhi oleh kompetensi dan kesadaran guru, strategi yang berorientasi pada kebutuhan siswa, serta dukungan dan koordinasi lintas sektor. Sejalan dengan itu, Suwarta et al. (2025) menemukan adanya kesenjangan antara kerangka kebijakan pendidikan inklusif dan penerapannya di lapangan, terutama terkait pelatihan, pendanaan, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan kebijakan saja belum menjamin efektivitas layanan apabila tidak disertai kemampuan menerjemahkannya ke dalam praktik yang adaptif, penguatan kompetensi, dan koordinasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, hambatan yang ditemukan di SMKN 5 Mataram menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi perpustakaan inklusif yang tidak hanya berorientasi pada akses, tetapi juga pada keterpaduan dan keberlanjutan pengelolaan layanan.

Model Strategi Perpustakaan Inklusif Berbasis ALKE

Berdasarkan sintesis temuan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan hambatan layanan, penelitian ini merumuskan Model Strategi Perpustakaan Inklusif berbasis ALKE yang terdiri atas Aksesibilitas, Layanan Adaptif, Kolaborasi, dan Evaluasi. Keempat komponen tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk rangkaian strategi yang saling berkaitan dalam mendukung pemenuhan hak belajar siswa berkebutuhan khusus. Aksesibilitas menjadi dasar untuk memastikan siswa dapat menggunakan ruang, fasilitas, koleksi, dan teknologi perpustakaan, sedangkan layanan adaptif menyesuaikan bentuk pelayanan dengan karakteristik kebutuhan siswa. Dalam konteks ini, aksesibilitas tidak hanya dimaknai sebagai akses fisik, tetapi juga mencakup akses terhadap informasi, koleksi, media, dan teknologi. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024

menegaskan pentingnya kebijakan dan kepemimpinan, aksesibilitas fisik, aksesibilitas informasi dan komunikasi, akomodasi yang layak, serta sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelayanan yang ramah kelompok rentan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024). Sementara itu, layanan adaptif dapat diwujudkan melalui pengembangan koleksi dalam format yang mudah diakses, penyediaan media visual dan audio, pemanfaatan teknologi bantu, serta pendampingan sesuai kebutuhan siswa. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat memperluas akses terhadap sumber informasi sekaligus meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan diri pengguna dalam memanfaatkan layanan perpustakaan (Mutia et al., 2024; Intawong et al., 2026). Dengan demikian, kedua komponen tersebut diarahkan untuk mengubah konsep “akses yang sama” menjadi “akses yang sesuai dengan kebutuhan” sehingga siswa berkebutuhan khusus dapat memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar secara lebih optimal.

Komponen kolaborasi dan evaluasi melengkapi proses tersebut dengan memastikan layanan inklusif dapat dikelola dan dikembangkan secara berkelanjutan. Kolaborasi diperlukan karena pemenuhan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus tidak dapat dibebankan hanya kepada pengelola perpustakaan. Kepala sekolah berperan memberikan dukungan kebijakan dan kelembagaan, pustakawan mengelola sumber informasi dan pelayanan, sedangkan guru dan GPK memahami kebutuhan pembelajaran serta memberikan pendampingan yang sesuai. Orang tua juga berperan sebagai mitra sekolah dengan memberikan informasi mengenai kebutuhan dan perkembangan siswa. Keterlibatan berbagai pihak melalui koordinasi yang saling melengkapi penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif (Gilson & Biggs, 2024; Sari et al., 2025). Selanjutnya, evaluasi diperlukan karena perpustakaan belum memiliki SOP, evaluasi layanan yang terstruktur, dan program pengembangan berkelanjutan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan, mengukur kesenjangan, menentukan prioritas perbaikan, serta merumuskan strategi pengembangan layanan secara sistematis (Aqmilannaja et al., 2024; Bai et al., 2024). Dengan demikian, evaluasi dalam model ALKE tidak ditempatkan sebagai tahap akhir yang bersifat administratif, tetapi sebagai proses berkelanjutan yang memberikan umpan balik bagi perencanaan dan pengembangan layanan berikutnya.

Secara keseluruhan, Model Strategi Perpustakaan Inklusif berbasis ALKE menunjukkan bahwa pemenuhan hak belajar siswa berkebutuhan khusus memerlukan keterpaduan antara aksesibilitas, layanan adaptif, kolaborasi, dan evaluasi. Model ini merespons temuan bahwa perpustakaan SMKN 5 Mataram telah menyediakan akses dasar bagi siswa berkebutuhan khusus, tetapi masih menghadapi keterbatasan fasilitas, koleksi, teknologi, kompetensi sumber daya manusia, anggaran, dan standarisasi layanan. Integrasi keempat komponen tersebut mengarahkan perpustakaan untuk tidak sekadar menjadi ruang yang dapat digunakan oleh semua siswa, tetapi berkembang menjadi sumber belajar yang mampu merespons kebutuhan secara spesifik, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, model ALKE dapat digunakan sebagai kerangka strategis bagi sekolah dalam mengembangkan perpustakaan inklusif sekaligus memperkuat pemenuhan hak belajar siswa berkebutuhan khusus secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, perpustakaan SMKN 5 Mataram telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pemenuhan hak belajar siswa berkebutuhan khusus melalui pemberian akses yang sama terhadap layanan dan fasilitas perpustakaan. Namun, pada aspek perencanaan, komitmen tersebut belum didukung oleh kebijakan khusus, SOP, program kerja, dan analisis kebutuhan siswa secara sistematis, sedangkan pada aspek pelaksanaan layanan

masih bersifat umum dan belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik kebutuhan siswa. Hambatan utama meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, koleksi adaptif, teknologi bantu, anggaran, kompetensi sumber daya manusia, serta belum tersedianya standar layanan khusus. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak belajar dalam konteks perpustakaan inklusif tidak cukup diwujudkan melalui kesamaan akses, tetapi memerlukan layanan yang aksesibel, adaptif, terencana, dan didukung oleh kolaborasi serta evaluasi yang berkelanjutan.

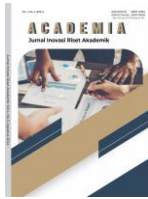
Sebagai implikasi pengembangan, penelitian ini merumuskan Model Strategi Perpustakaan Inklusif berbasis ALKE (Aksesibilitas, Layanan Adaptif, Kolaborasi, dan Evaluasi) sebagai kerangka yang dapat digunakan untuk mengarahkan pengembangan layanan perpustakaan inklusif secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Model ini menempatkan aksesibilitas sebagai dasar, layanan adaptif sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan siswa, kolaborasi sebagai penguatan dukungan antarpemangku kepentingan, dan evaluasi sebagai mekanisme perbaikan berkelanjutan. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan desain studi kasus yang hanya dilakukan di satu sekolah sehingga penerapan model ALKE belum dapat digeneralisasikan pada seluruh konteks sekolah inklusif. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan dan menguji model ALKE pada sekolah dengan karakteristik dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus yang lebih beragam, termasuk melalui penelitian lintas sekolah atau penelitian pengembangan untuk menguji efektivitas setiap komponen model dalam meningkatkan akses dan pemanfaatan sumber belajar bagi siswa berkebutuhan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqmilannaja, A. U., Wafirah, M., & Hasyim, A. F. (2024). Evaluasi kualitas layanan perpustakaan menggunakan aplikasi SLiMS di SMK Syubbanul Wathon Secang. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4(2), 614–630. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i02.4517>
- Bai, Z., Yu, L., Zhao, L., & Wang, W. (2024). Research on the construction and application of a smart library services maturity evaluation system based on CMM. *The Electronic Library*, 42(5), 766–794. <https://doi.org/10.1108/EL-11-2023-0284>
- Cabatay, M., Hermanto, H., & Aningrum, R. (2024). Contributing factors to the progress of inclusive education implementation in Indonesia. *INKLUSI*, 11(1), 45–62. <https://doi.org/10.14421/ijds.110103>
- Darmanto. (2022). *Manajemen perpustakaan*. PT Bumi Aksara. <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK24674/manajemen-perpustakaan>
- Geri, C. A., & Mudawamah, N. S. (2025). Strategi meningkatkan akses dan layanan inklusif bagi pengguna disabilitas di perpustakaan. *Daluang: Journal of Library and Information Science*, 5(2). <https://doi.org/10.21580/daluang.v5i2.2025.26374>
- Gilson, C. B., & Biggs, E. E. (2024). Perspectives of special education teachers and paraprofessionals on working together in general education settings. *International Journal of Inclusive Education*, 28(14), 3341–3356. <https://doi.org/10.1080/13603116.2023.2216206>
- Hamida, N. A., & Sein, L. H. (2023). Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk menciptakan knowledge society. *Pustakaloka*, 15(1), 153–173. <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v15i1.5808>
- Intawong, K., Khanchai, S., Thongthip, P., Yensathit, Y., & Puritat, K. (2026). Inclusive library services through virtual reality: Enhancing access and reducing anxiety for hearing and physically impaired students. *Journal of Librarianship and Information Science*, 58(2), 962–979. <https://doi.org/10.1177/09610006251335023>



- Irawan, M. A., & Anwar, Z. (2025). Harnessing artificial intelligence for inclusive education management: Strategies for supporting students with special needs. *Journal of Educational Management and Instruction (JEMIN)*, 5(2), 350–370.
<https://doi.org/10.22515/jemin.v5i2.11650>
- Jaya, I., Mursita, R. A., Maulidina, C. A., Bahrudin, B., & Taboer, M. A. (2025). Evaluating the effectiveness of learning outcomes assessment for students with special needs in inclusive education schools in Jakarta. *Journal of ICSAR*, 9(1), 41–51.
<https://journal-fip.um.ac.id/index.php/icsar/article/view/3257>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan*.
- Muthia, N., & Fauziah, K. (2025). Layanan berbasis inklusi sosial untuk penyandang disabilitas di Perpustakaan Kota Bogor. *BACA: Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, 45(2), 143–157. <https://doi.org/10.55981/baca.2024.5699>
- Mutia, F., Paramita, P. P., Musyahda, L., Cahyani, I. R., Mahadewi, M. P., & Rozi, R. (2024). Assistive technology adoption and impact on academic success: A case study of university library resources for students with disabilities. *EAI*.
<https://doi.org/10.4108/eai.21-11-2023.2352619>
- Pawestri, R. T., & Inawati, I. (2024). Layanan prima pada layanan pojok Braille sebagai layanan berbasis inklusi sosial di Perpustakaan Umum Kota Malang. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 20(2), 227–241. <https://doi.org/10.22146/bip.v20i2.9778>
- Permatasari, B. D., Yusuf, M., & Yuwono, J. (2026). Inclusive education in Indonesian primary schools: A multidimensional evaluation of institutional capacity and systemic disparities. *International Journal of Special Education*.
<https://acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/article/view/10485>
- Purnomo, G. W., & Wikandani, P. R. (2024). Strengthening accessibility and inclusivity in libraries: The role of adaptive technology in supporting visually impaired users. *Knowledge Garden*, 2(1), 48–62.
<https://doi.org/10.21776/ub.knowledgegarden.2024.2.1.15>
- Rahmady, F., Samosir, F. T., & Sadiyah, L. (2025). Peran layanan disabilitas dalam meningkatkan aksesibilitas informasi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. *TIK Ilmew: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 9(1), 255–264.
<https://doi.org/10.29240/tik.v9i1.12446>
- Rejeki, D. S., Supratiwi, M., Widyastono, H., Gunarhadi, G., Hermawan, H., Yuwono, J., & Cahyani, L. A. (2025). Parental involvement of children with special needs: Insights from Epstein's six domains framework. *Jurnal Pendidikan Progresif*.
<https://jpp.fkip.unila.ac.id/index.php/jpp/article/view/38/>
- Ridlo, M. R., Simaremare, D., Simanungkalit, G. A., & Sani, T. K. (2024). Perpustakaan inklusif untuk pengguna disabilitas: Analisis literatur tentang praktik dan tantangan. *Journal Net Library and Information*, 1(1), 58–63.
<https://www.mendeley.com/catalogue/4569dd22-a71b-366f-b341-d5fe57c3779b/>
- Sari, N. M., Purwanta, E., Cahyani, L. A., & Prihandini, F. (2025). Multidimensional parental involvement in inclusive education: A multiple case study of students with special needs. *Jurnal Pendidikan Progresif*, 15(4), 2727–2740.
<https://jpp.fkip.unila.ac.id/index.php/jpp/article/view/1314>



- Susanti, S. R., & Ramadhani, A. (2024). Pendidikan anak berkebutuhan khusus pada anak tunagrahita di sekolah inklusif jenjang sekolah dasar. *PPSDP Undergraduate Journal of Educational Sciences*, 2(1), 90–105.
<https://ejournal.ppsdp.org/index.php/pujes/article/download/233/185/3057>
- Suwarda, N., Fradana, A. N., Astutiek, D., Salim, A., Susilo, J., & Koesbandriyo, B. (2025). Bridging gaps in government policies for inclusive education in Indonesia. *Academia Open*, 10(1). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.10485>
- Wood, S., Stocker, K., Sharma, U., & Lei, E. (2025). A scoping review of the components of effective teacher in-service professional development in inclusive education. *International Journal of Inclusive Education*, 1–30.
<https://doi.org/10.1080/13603116.2025.2554251>